



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 /PMK.07/2015

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
2. Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran Kapasitas Fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal.

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal dapat digunakan untuk:
- a. pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah;
 - b. penilaian atas usulan pinjaman daerah;
 - c. penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - d. hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal terdiri atas Peta Kapasitas Fiskal Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD + DAU + DBH + Otsus + Transfer Prov + LP) - BP}{Jumlah Penduduk Miskin}$$

Keterangan:

KF	= Kapasitas Fiskal
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH	= Dana Bagi Hasil
DAU	= Dana Alokasi Umum
Otsus	= Dana Otonomi Khusus
Transfer Prov	= Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota (bernilai positif untuk Kabupaten/Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
LP	= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BP	= Belanja Pegawai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013.
- (3) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai sistem akuntansi pemerintah.
- (4) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Provinsi.
- (5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori Kapasitas Fiskal sebagai berikut:
 - a. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 ($\text{indeks} \geq 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;
 - b. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
 - c. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan
 - d. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} \leq 0,5$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

Pasal 5

- (1) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah pemekaran tahun 2013 dan tahun 2014 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal daerah induk.
- (2) Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah yang tidak menyampaikan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 atau daerah yang telah menyampaikan data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 namun tidak disertai rincian informasi yang diperlukan untuk penghitungan Kapasitas Fiskal, sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal tahun sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 338

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

ACHMAD SAEFUDIN

NIP 195611051977421001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	Provinsi Aceh	1,15	tinggi
2	Provinsi Sumatera Utara	0,37	rendah
3	Provinsi Sumatera Barat	0,49	rendah
4	Provinsi Riau	0,99	sedang
5	Provinsi Jambi	0,65	sedang
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,34	rendah
7	Provinsi Bengkulu	0,37	rendah
8	Provinsi Lampung	0,24	rendah
9	Provinsi DKI Jakarta	8,69	sangat tinggi
10	Provinsi Jawa Barat	0,27	rendah
11	Provinsi Jawa Tengah	0,12	rendah
12	Provinsi DI Yogyakarta	0,26	rendah
13	Provinsi Jawa Timur	0,20	rendah
14	Provinsi Kalimantan Barat	0,42	rendah
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1,35	tinggi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	1,50	tinggi
17	Provinsi Kalimantan Timur	3,66	sangat tinggi
18	Provinsi Sulawesi Utara	0,66	sedang
19	Provinsi Sulawesi Tengah	0,34	rendah
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0,32	rendah
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,35	rendah
22	Provinsi Bali	1,49	tinggi
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,15	rendah
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,12	rendah
25	Provinsi Maluku	0,30	rendah
26	Provinsi Papua	0,95	sedang
27	Provinsi Maluku Utara	1,15	tinggi
28	Provinsi Banten	0,58	sedang
29	Provinsi Bangka Belitung	1,27	tinggi
30	Provinsi Gorontalo	0,33	rendah
31	Provinsi Kepulauan Riau	1,68	tinggi
32	Provinsi Papua Barat	2,45	sangat tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	0,47	rendah
34	Provinsi Kalimantan Timur	3,66	sangat tinggi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM


ACHMAD SAEFUDIN
NIP 195611051977121001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 /PMK.07/2015
TENTANG
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	Kab. Aceh Barat	0,20	rendah
2	Kab. Aceh Besar	0,19	rendah
3	Kab. Aceh Selatan	0,29	rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0,42	rendah
5	Kab. Aceh Tengah	0,43	rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	0,39	rendah
7	Kab. Aceh Timur	0,22	rendah
8	Kab. Aceh Utara	0,26	rendah
9	Kab. Bireuen	0,13	rendah
10	Kab. Pidie	0,13	rendah
11	Kab. Simeulue	0,44	rendah
12	Kota Banda Aceh	0,65	sedang
13	Kota Sabang	1,39	tinggi
14	Kota Langsa	0,33	rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,61	sedang
16	Kab. Gayo Lues	0,71	sedang
17	Kab. Aceh Barat Daya	0,34	rendah
18	Kab. Aceh Jaya	0,59	sedang
19	Kab. Nagan Raya	0,38	rendah
20	Kab. Aceh Tamiang	0,27	rendah
21	Kab. Bener Meriah	0,40	rendah
22	Kab. Pidie Jaya	0,26	rendah
23	Kota Subulussalam	0,60	sedang
24	Kab. Asahan	0,33	rendah
25	Kab. Dairi	0,41	rendah
26	Kab. Deli Serdang	0,33	rendah
27	Kab. Karo	0,36	rendah
28	Kab. Labuhan Batu	0,35	rendah
29	Kab. Langkat	0,19	rendah
30	Kab. Mandailing Natal	0,28	rendah
31	Kab. Nias	0,46	rendah
32	Kab. Simalungun	0,14	rendah
33	Kab. Tapanuli Selatan	0,52	sedang
34	Kab. Tapanuli Tengah	0,32	rendah
35	Kab. Tapanuli Utara	0,38	rendah
36	Kab. Toba Samosir	0,78	sedang
37	Kota Binjai	0,61	sedang
38	Kota Medan	0,25	rendah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
39	Kota Pematang Siantar	0,23	rendah
40	Kota Sibolga	0,76	sedang
41	Kota Tanjung Balai	0,55	sedang
42	Kota Tebing Tinggi	0,69	sedang
43	Kota Padang Sidempuan	0,43	rendah
44	Kab. Pakpak Bharat	2,11	sangat tinggi
45	Kab. Nias Selatan	0,23	rendah
46	Kab. Humbang Hasundutan	0,63	sedang
47	Kab. Serdang Bedagai	0,25	rendah
48	Kab. Samosir	0,79	sedang
49	Kab. Batu Bara	0,18	rendah
50	Kab. Padang Lawas	0,64	sedang
51	Kab. Padang Lawas Utara	0,73	sedang
52	Kab. Labuhan Batu Selatan	0,41	rendah
53	Kab. Labuhan Batu Utara	0,47	rendah
54	Kab. Nias Utara	0,26	rendah
55	Kab. Nias Barat	0,35	rendah
56	Kota Gunungsitoli	0,24	rendah
57	Kab. Limapuluh Kota	0,29	rendah
58	Kab. Agam	0,19	rendah
59	Kab. Kepulauan Mentawai	1,16	tinggi
60	Kab. Padang Pariaman	0,21	rendah
61	Kab. Pasaman	0,47	rendah
62	Kab. Pesisir Selatan	0,33	rendah
63	Kab. Sijunjung	0,57	sedang
64	Kab. Solok	0,26	rendah
65	Kab. Tanah Datar	0,34	rendah
66	Kota Bukit Tinggi	1,11	tinggi
67	Kota Padang Panjang	2,49	sangat tinggi
68	Kota Padang	0,43	rendah
69	Kota Payakumbuh	0,74	sedang
70	Kota Sawahlunto	5,89	sangat tinggi
71	Kota Solok	2,84	sangat tinggi
72	Kota Pariaman	2,14	sangat tinggi
73	Kab. Pasaman Barat	0,39	rendah
74	Kab. Dharmasraya	0,66	sedang
75	Kab. Solok Selatan	0,85	sedang
76	Kab. Bengkulu	2,72	sangat tinggi
77	Kab. Indragiri Hilir	0,75	sedang
78	Kab. Indragiri Hulu	1,37	tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
79	Kab. Kampar	0,82	sedang
80	Kab. Kuantan Singingi	0,88	sedang
81	Kab. Pelalawan	0,97	sedang
82	Kab. Rokan Hilir	1,48	tinggi
83	Kab. Rokan Hulu	0,64	sedang
84	Kab. Siak	3,59	sangat tinggi
85	Kota Dumai	2,09	sangat tinggi
86	Kota Pekanbaru	1,44	tinggi
87	Kab. Kepulauan Meranti	0,55	sedang
88	Kab. Batanghari	0,87	sedang
89	Kab. Bungo	1,06	tinggi
90	Kab. Kerinci	0,84	sedang
91	Kab. Merangin	0,55	sedang
92	Kab. Muaro Jambi	1,26	tinggi
93	Kab. Sarolangun	0,69	sedang
94	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,06	tinggi
95	Kab. Tanjung Jabung Timur	1,02	tinggi
96	Kab. Tebo	0,89	sedang
97	Kota Jambi	0,38	rendah
98	Kota Sungai Penuh	4,57	sangat tinggi
99	Kab. Lahat	0,33	rendah
100	Kab. Musi Banyuasin	1,14	tinggi
101	Kab. Musi Rawas	0,45	rendah
102	Kab. Muara Enim	0,53	sedang
103	Kab. Ogan Komering Ilir	0,34	rendah
104	Kab. Ogan Komering Ulu	0,75	sedang
105	Kota Palembang	0,18	rendah
106	Kota Prabumulih	1,22	tinggi
107	Kota Pagar Alam	1,37	tinggi
108	Kota Lubuk Linggau	0,62	sedang
109	Kab. Banyuasin	0,44	rendah
110	Kab. Ogan Ilir	0,44	rendah
111	Kab. OKU Timur	0,28	rendah
112	Kab. OKU Selatan	0,58	sedang
113	Kab. Empat Lawang	0,63	sedang
114	Kab. Bengkulu Selatan	0,21	rendah
115	Kab. Bengkulu Utara	0,21	rendah
116	Kab. Rejang Lebong	0,23	rendah
117	Kota Bengkulu	0,13	rendah
118	Kab. Kaur	0,35	rendah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
119	Kab. Seluma	0,23	rendah
120	Kab. Muko-muko	0,54	sedang
121	Kab. Lebong	0,63	sedang
122	Kab. Kepahiang	0,48	rendah
123	Kab. Bengkulu Tengah	1,02	tinggi
124	Kab. Lampung Barat	0,26	rendah
125	Kab. Lampung Selatan	0,10	rendah
126	Kab. Lampung Tengah	0,08	rendah
127	Kab. Lampung Utara	0,08	rendah
128	Kab. Lampung Timur	0,08	rendah
129	Kab. Tanggamus	0,21	rendah
130	Kab. Tulang Bawang	0,04	rendah
131	Kab. Way Kanan	0,20	rendah
132	Kota Bandar Lampung	0,24	rendah
133	Kota Metro	0,55	sedang
134	Kab. Pesawaran	0,17	rendah
135	Kab. Pringsewu	0,20	rendah
136	Kab. Mesuji	1,24	tinggi
137	Kab. Tulangbawang Barat	0,76	sedang
138	Kab. Bandung	0,19	rendah
139	Kab. Bekasi	0,69	sedang
140	Kab. Bogor	0,25	rendah
141	Kab. Ciamis	0,16	rendah
142	Kab. Cianjur	0,14	rendah
143	Kab. Cirebon	0,10	rendah
144	Kab. Garut	0,08	rendah
145	Kab. Indramayu	0,15	rendah
146	Kab. Karawang	0,23	rendah
147	Kab. Kuningan	0,10	rendah
148	Kab. Majalengka	0,14	rendah
149	Kab. Purwakarta	0,26	rendah
150	Kab. Subang	0,13	rendah
151	Kab. Sukabumi	0,17	rendah
152	Kab. Sumedang	0,14	rendah
153	Kab. Tasikmalaya	0,14	rendah
154	Kota Bandung	0,90	sedang
155	Kota Bekasi	0,53	sedang
156	Kota Bogor	0,43	rendah
157	Kota Cirebon	0,63	sedang
158	Kota Depok	1,19	tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
159	Kota Sukabumi	0,65	sedang
160	Kota Tasikmalaya	0,20	rendah
161	Kota Cimahi	0,49	rendah
162	Kota Banjar	1,20	tinggi
163	Kab. Bandung Barat	0,14	rendah
164	Kab. Banjarnegara	0,10	rendah
165	Kab. Banyumas	0,09	rendah
166	Kab. Batang	0,18	rendah
167	Kab. Blora	0,12	rendah
168	Kab. Boyolali	0,13	rendah
169	Kab. Brebes	0,08	rendah
170	Kab. Cilacap	0,13	rendah
171	Kab. Demak	0,16	rendah
172	Kab. Grobogan	0,11	rendah
173	Kab. Jepara	0,23	rendah
174	Kab. Karanganyar	0,11	rendah
175	Kab. Kebumen	0,07	rendah
176	Kab. Kendal	0,17	rendah
177	Kab. Klaten	0,08	rendah
178	Kab. Kudus	0,32	rendah
179	Kab. Magelang	0,12	rendah
180	Kab. Pati	0,15	rendah
181	Kab. Pekalongan	0,14	rendah
182	Kab. Pemasang	0,08	rendah
183	Kab. Purbalingga	0,09	rendah
184	Kab. Purworejo	0,10	rendah
185	Kab. Rembang	0,15	rendah
186	Kab. Semarang	0,26	rendah
187	Kab. Sragen	0,12	rendah
188	Kab. Sukoharjo	0,23	rendah
189	Kab. Tegal	0,14	rendah
190	Kab. Temanggung	0,20	rendah
191	Kab. Wonogiri	0,09	rendah
192	Kab. Wonosobo	0,11	rendah
193	Kota Magelang	0,95	sedang
194	Kota Pekalongan	0,55	sedang
195	Kota Salatiga	0,97	sedang
196	Kota Semarang	0,79	sedang
197	Kota Surakarta	0,33	rendah
198	Kota Tegal	0,65	sedang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
199	Kab. Bantul	0,10	rendah
200	Kab. Gunung Kidul	0,08	rendah
201	Kab. Kulon Progo	0,09	rendah
202	Kab. Sleman	0,39	rendah
203	Kota Yogyakarta	0,64	sedang
204	Kab. Bangkalan	0,08	rendah
205	Kab. Banyuwangi	0,18	rendah
206	Kab. Blitar	0,13	rendah
207	Kab. Bojonegoro	0,22	rendah
208	Kab. Bondowoso	0,15	rendah
209	Kab. Gresik	0,25	rendah
210	Kab. Jember	0,12	rendah
211	Kab. Jombang	0,15	rendah
212	Kab. Kediri	0,11	rendah
213	Kab. Lamongan	0,12	rendah
214	Kab. Lumajang	0,14	rendah
215	Kab. Madiun	0,17	rendah
216	Kab. Magetan	0,13	rendah
217	Kab. Malang	0,13	rendah
218	Kab. Mojokerto	0,22	rendah
219	Kab. Nganjuk	0,12	rendah
220	Kab. Ngawi	0,11	rendah
221	Kab. Pacitan	0,11	rendah
222	Kab. Pamekasan	0,12	rendah
223	Kab. Pasuruan	0,17	rendah
224	Kab. Ponorogo	0,12	rendah
225	Kab. Probolinggo	0,08	rendah
226	Kab. Sampang	0,07	rendah
227	Kab. Sidoarjo	0,44	rendah
228	Kab. Situbondo	0,16	rendah
229	Kab. Sumenep	0,11	rendah
230	Kab. Trenggalek	0,12	rendah
231	Kab. Tuban	0,13	rendah
232	Kab. Tulungagung	0,18	rendah
233	Kota Blitar	1,27	tinggi
234	Kota Kediri	0,72	sedang
235	Kota Madiun	1,52	tinggi
236	Kota Malang	0,70	sedang
237	Kota Mojokerto	1,73	tinggi
238	Kota Pasuruan	0,65	sedang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
239	Kota Probolinggo	0,31	rendah
240	Kota Surabaya	0,92	sedang
241	Kota Batu	1,29	tinggi
242	Kab. Bengkayang	0,80	sedang
243	Kab. Landak	0,43	rendah
244	Kab. Kapuas Hulu	1,12	tinggi
245	Kab. Ketapang	0,66	sedang
246	Kab. Pontianak	0,76	sedang
247	Kab. Sambas	0,30	rendah
248	Kab. Sanggau	0,96	sedang
249	Kab. Sintang	0,66	sedang
250	Kota Pontianak	0,78	sedang
251	Kota Singkawang	0,86	sedang
252	Kab. Sekadau	1,10	tinggi
253	Kab. Melawi	0,57	sedang
254	Kab. Kayong Utara	1,24	tinggi
255	Kab. Kubu Raya	0,72	sedang
256	Kab. Barito Selatan	2,07	sangat tinggi
257	Kab. Barito Utara	2,94	sangat tinggi
258	Kab. Kapuas	1,02	tinggi
259	Kab. Kotawaringin Barat	1,76	tinggi
260	Kab. Kotawaringin Timur	1,14	tinggi
261	Kota Palangkaraya	1,88	tinggi
262	Kab. Katingan	2,42	sangat tinggi
263	Kab. Seruyan	1,98	tinggi
264	Kab. Sukamara	8,00	sangat tinggi
265	Kab. Lamandau	5,18	sangat tinggi
266	Kab. Gunung Mas	2,29	sangat tinggi
267	Kab. Pulang Pisau	2,33	sangat tinggi
268	Kab. Murung Raya	4,61	sangat tinggi
269	Kab. Barito Timur	1,56	tinggi
270	Kab. Banjar	1,82	tinggi
271	Kab. Barito Kuala	0,55	sedang
272	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,19	tinggi
273	Kab. Hulu Sungai Tengah	1,09	tinggi
274	Kab. Hulu Sungai Utara	1,24	tinggi
275	Kab. Kotabaru	2,68	sangat tinggi
276	Kab. Tabalong	1,79	tinggi
277	Kab. Tanah Laut	2,81	sangat tinggi
278	Kab. Tapin	3,65	sangat tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
279	Kota Banjarbaru	1,80	tinggi
280	Kota Banjarmasin	0,86	sedang
281	Kab. Balangan	3,63	sangat tinggi
282	Kab. Tanah Bumbu	2,11	sangat tinggi
283	Kab. Berau	6,81	sangat tinggi
284	Kab. Kutai Kartanegara	4,28	sangat tinggi
285	Kab. Kutai Barat	6,40	sangat tinggi
286	Kab. Kutai Timur	4,79	sangat tinggi
287	Kab. Paser	3,73	sangat tinggi
288	Kota Balikpapan	5,73	sangat tinggi
289	Kota Bontang	6,89	sangat tinggi
290	Kota Samarinda	1,90	tinggi
291	Kab. Penajam Paser Utara	4,22	sangat tinggi
292	Kab. Bolaang Mongondow	0,48	rendah
293	Kab. Minahasa	0,25	rendah
294	Kab. Sangihe	0,46	rendah
295	Kota Bitung	0,86	sedang
296	Kota Manado	0,89	sedang
297	Kab. Kepulauan Talaud	1,07	tinggi
298	Kab. Minahasa Selatan	0,38	rendah
299	Kota Tomohon	1,09	tinggi
300	Kab. Minahasa Utara	0,85	sedang
301	Kab. Kep. Siau Tagulandang	1,23	tinggi
302	Kota Kotamobagu	1,06	tinggi
303	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,32	tinggi
304	Kab. Minahasa Tenggara	0,71	sedang
305	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,90	tinggi
306	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1,07	tinggi
307	Kab. Banggai	0,49	rendah
308	Kab. Banggai Kepulauan	0,42	rendah
309	Kab. Buol	0,50	sedang
310	Kab. Toli-Toli	0,43	rendah
311	Kab. Donggala	0,28	rendah
312	Kab. Morowali	0,58	sedang
313	Kab. Poso	0,29	rendah
314	Kota Palu	0,50	sedang
315	Kab. Parigi Moutong	0,19	rendah
316	Kab. Tojo Una-Una	0,47	rendah
317	Kab. Sigi	0,40	rendah
318	Kab. Bantaeng	0,48	rendah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
319	Kab. Barru	0,26	Rendah
320	Kab. Bone	0,19	rendah
321	Kab. Bulukumba	0,33	rendah
322	Kab. Enrekang	0,32	rendah
323	Kab. Gowa	0,26	rendah
324	Kab. Jenepono	0,15	rendah
325	Kab. Luwu	0,23	rendah
326	Kab. Luwu Utara	0,31	rendah
327	Kab. Maros	0,31	rendah
328	Kab. Pangkajene Kepulauan	0,24	rendah
329	Kota Palopo	0,64	sedang
330	Kab. Luwu Timur	0,84	sedang
331	Kab. Pinrang	0,41	rendah
332	Kab. Sinjai	0,39	rendah
333	Kab. Kepulauan Selayar	0,60	sedang
334	Kab. Sidenreng Rappang	0,57	sedang
335	Kab. Soppeng	0,37	rendah
336	Kab. Takalar	0,34	rendah
337	Kab. Tana Toraja	0,31	rendah
338	Kab. Wajo	0,56	sedang
339	Kota Pare-pare	1,28	tinggi
340	Kota Makassar	0,68	sedang
341	Kab. Toraja Utara	0,29	rendah
342	Kab. Buton	0,27	rendah
343	Kab. Konawe	0,30	rendah
344	Kab. Kolaka	0,29	rendah
345	Kab. Muna	0,22	rendah
346	Kota Kendari	0,72	sedang
347	Kota Bau-bau	0,69	sedang
348	Kab. Konawe Selatan	0,46	rendah
349	Kab. Bombana	0,63	sedang
350	Kab. Wakatobi	0,38	rendah
351	Kab. Kolaka Utara	0,80	sedang
352	Kab. Konawe Utara	3,18	sangat tinggi
353	Kab. Buton Utara	0,85	sedang
354	Kab. Badung	7,14	sangat tinggi
355	Kab. Bangli	1,01	tinggi
356	Kab. Buleleng	0,38	rendah
357	Kab. Gianyar	0,99	sedang
358	Kab. Jembrana	0,91	sedang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
359	Kab. Karangasem	0,56	sedang
360	Kab. Klungkung	0,91	sedang
361	Kab. Tabanan	0,88	sedang
362	Kota Denpasar	2,19	sangat tinggi
363	Kab. Bima	0,19	rendah
364	Kab. Dompu	0,24	rendah
365	Kab. Lombok Barat	0,11	rendah
366	Kab. Lombok Tengah	0,09	rendah
367	Kab. Lombok Timur	0,05	rendah
368	Kab. Sumbawa	0,18	rendah
369	Kota Mataram	0,25	rendah
370	Kota Bima	0,38	rendah
371	Kab. Sumbawa Barat	0,64	sedang
372	Kab. Lombok Utara	0,14	rendah
373	Kab. Alor	0,24	rendah
374	Kab. Belu	0,32	rendah
375	Kab. Ende	0,18	rendah
376	Kab. Flores Timur	0,47	rendah
377	Kab. Kupang	0,09	rendah
378	Kab. Lembata	0,28	rendah
379	Kab. Manggarai	0,17	rendah
380	Kab. Ngada	0,48	rendah
381	Kab. Sikka	0,26	rendah
382	Kab. Sumba Barat	0,26	rendah
383	Kab. Sumba Timur	0,19	rendah
384	Kab. Timor Tengah Selatan	0,08	rendah
385	Kab. Timor Tengah Utara	0,16	rendah
386	Kota Kupang	0,22	rendah
387	Kab. Rote Ndao	0,28	rendah
388	Kab. Manggarai Barat	0,24	rendah
389	Kab. Nagekeo	0,52	sedang
390	Kab. Sumba Barat Daya	0,13	rendah
391	Kab. Sumba Tengah	0,40	rendah
392	Kab. Manggarai Timur	0,16	rendah
393	Kab. Sabu Raijua	0,42	rendah
394	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,34	rendah
395	Kab. Maluku Tengah	0,17	rendah
396	Kab. Maluku Tenggara	0,43	rendah
397	Kab. Buru	0,41	rendah
398	Kota Ambon	0,32	rendah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
399	Kab. Seram Bagian Barat	0,14	rendah
400	Kab. Seram Bagian Timur	0,58	sedang
401	Kab. Kepulauan Aru	0,44	rendah
402	Kota Tual	0,67	sedang
403	Kab. Maluku Barat Daya	0,73	sedang
404	Kab. Buru Selatan	1,08	tinggi
405	Kab. Biak Numfor	0,29	rendah
406	Kab. Jayapura	0,91	sedang
407	Kab. Jayawijaya	0,27	rendah
408	Kab. Merauke	1,67	tinggi
409	Kab. Mimika	1,14	tinggi
410	Kab. Nabire	0,40	rendah
411	Kab. Paniai	0,22	rendah
412	Kab. Puncak Jaya	0,51	sedang
413	Kab. Kepulauan Yapen	0,41	rendah
414	Kota Jayapura	0,54	sedang
415	Kab. Sarmi	1,87	tinggi
416	Kab. Keerom	1,33	tinggi
417	Kab. Yahukimo	0,28	rendah
418	Kab. Pegunungan Bintang	1,04	tinggi
419	Kab. Tolikara	0,42	rendah
420	Kab. Boven Digoel	1,28	tinggi
421	Kab. Mappi	1,01	tinggi
422	Kab. Asmat	1,02	tinggi
423	Kab. Waropen	1,90	tinggi
424	Kab. Supiori	2,28	sangat tinggi
425	Kab. Mamberamo Raya	5,09	sangat tinggi
426	Kab. Mamberamo Tengah	1,35	tinggi
427	Kab. Yalimo	0,89	sedang
428	Kab. Lanny Jaya	0,33	rendah
429	Kab. Nduga	0,49	rendah
430	Kab. Dogiyai	0,51	sedang
431	Kab. Puncak	0,68	sedang
432	Kab. Intan Jaya	1,38	tinggi
433	Kab. Deiyai	0,29	rendah
434	Kab. Halmahera Tengah	1,84	tinggi
435	Kota Ternate	1,45	tinggi
436	Kab. Halmahera Barat	0,87	sedang
437	Kab. Halmahera Timur	1,49	tinggi
438	Kab. Halmahera Selatan	1,07	tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
439	Kab. Halmahera Utara	1,51	tinggi
440	Kab. Kepulauan Sula	1,06	tinggi
441	Kota Tidore Kepulauan	2,31	sangat tinggi
442	Kab. Pulau Morotai	0,84	sedang
443	Kab. Lebak	0,17	rendah
444	Kab. Pandeglang	0,10	rendah
445	Kab. Serang	0,49	rendah
446	Kab. Tangerang	0,61	sedang
447	Kota Cilegon	1,62	tinggi
448	Kota Tangerang	0,65	sedang
449	Kota Serang	0,36	rendah
450	Kota Tangerang Selatan	2,71	sangat tinggi
451	Kab. Bangka	0,97	sedang
452	Kab. Belitung	1,10	tinggi
453	Kota Pangkal Pinang	1,85	tinggi
454	Kab. Bangka Selatan	1,83	tinggi
455	Kab. Bangka Tengah	1,43	tinggi
456	Kab. Bangka Barat	2,75	sangat tinggi
457	Kab. Belitung Timur	1,96	tinggi
458	Kab. Boalemo	0,28	rendah
459	Kab. Gorontalo	0,09	rendah
460	Kota Gorontalo	0,65	sedang
461	Kab. Pohuwato	0,37	rendah
462	Kab. Bone Bolango	0,29	rendah
463	Kab. Gorontalo Utara	0,40	rendah
464	Kab. Natuna	17,78	sangat tinggi
465	Kab. Kepulauan Anambas	18,16	sangat tinggi
466	Kab. Karimun	2,22	sangat tinggi
467	Kota Batam	0,85	sedang
468	Kota Tanjung Pinang	1,16	tinggi
469	Kab. Lingga	2,02	sangat tinggi
470	Kab. Bintan	2,99	sangat tinggi
471	Kab. Fakfak	0,97	sedang
472	Kab. Manokwari	0,37	rendah
473	Kab. Sorong	1,13	tinggi
474	Kota Sorong	0,35	rendah
475	Kab. Raja Ampat	2,37	sangat tinggi
476	Kab. Sorong Selatan	1,97	tinggi
477	Kab. Teluk Bintuni	1,96	tinggi
478	Kab. Teluk Wondama	1,46	tinggi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Nama Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
479	Kab. Kaimana	2,32	sangat tinggi
480	Kab. Maybrat	1,48	tinggi
481	Kab. Tambrau	4,29	sangat tinggi
482	Kab. Majene	0,33	rendah
483	Kab. Mamuju	0,30	rendah
484	Kab. Polewali Mandar	0,13	rendah
485	Kab. Mamasa	0,56	sedang
486	Kab. Mamuju Utara	0,90	sedang
487	Kab. Bulungan	4,68	sangat tinggi
488	Kab. Malinau	9,84	sangat tinggi
489	Kab. Nunukan	3,80	sangat tinggi
490	Kota Tarakan	2,19	sangat tinggi
491	Kab. Tana Tidung	25,03	sangat tinggi
492	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0,53	sedang
493	Kab. Musi Rawas Utara	0,45	rendah
494	Kab. Pangandaran	0,16	rendah
495	Kab. Pesisir Barat	0,26	rendah
496	Kab. Malaka	0,32	rendah
497	Kab. Pulau Taliabu	1,06	tinggi
498	Kab. Manokwari Selatan	0,37	rendah
499	Kab. Pegunungan Arfak	0,37	rendah
500	Kab. Mamuju Tengah	0,30	rendah
501	Kab. Mahakam Ulu	6,40	sangat tinggi
502	Kab. Banggai Laut	0,42	rendah
503	Kab. Morowali Utara	0,58	sedang
504	Kab. Konawe Kepulauan	0,30	rendah
505	Kab. Kolaka Timur	0,29	rendah

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM


ACHMAD SAEFUDIN
NIP 195611051977121001